

Penyuluhan Investasi Hijau dalam mendukung Ibu Kota Negara Nusantara

Yesi Aprianti¹, Auliansyah^{2*}, Irwan Gani³, Muliati⁴, Nanda Ningtias⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mulawarman

²Email: auliansyah@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Kalimantan Timur telah mengalami transformasi ekonomi dari sektor kehutanan ke sektor pertambangan minyak, gas dan batu bara. Pola ekstraktif tersebut mendorong pemerintah untuk membangun pada arah berkelanjutan dengan menganut konsep ekonomi hijau. Faktor kunci ekonomi hijau adalah investasi hijau. Kedepan, akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan dan energi seiring dengan mulainya beroperasi IKN Nusantara. Hal tersebut merupakan tantangan, mengingat pada beberapa komoditi pangan, Kalimantan Timur masih mengalami kekurangan sehingga mengandalkan provinsi sekitarnya, sedangkan energi masih mengandalkan sumber daya fosil. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah Kalimantan Timur dan IKN Nusantara untuk mencapai tujuan dan target pembangunan berkelanjutan. Sebagai tanggung jawab sosial, kami berupaya meningkatkan kapasitas beberapa organisasi pemerintah daerah Kalimantan Timur melalui penyuluhan dan sosialisasi investasi hijau.

Kata kunci: Kolaborasi, Sosialisasi investasi hijau, transformasi ekonomi

Abstract

East Kalimantan has undergone an economic transformation from the forestry sector to the oil, gas and coal mining sector. This extractive pattern encourages the government to build on a sustainable direction by adhering to the concept of a green economy. A key factor in the green economy is green investment. In the future, there will be an increase in food and energy needs in line with the start of IKN Nusantara operations. This is a challenge, considering that in some food commodities, East Kalimantan is still experiencing shortages so it relies on surrounding provinces, while energy still relies on fossil resources. Collaboration between the Government of East Kalimantan and IKN Nusantara is needed to achieve sustainable development goals and targets. As a social responsibility, we seek to increase the capacity of several East Kalimantan local government organizations through counseling and socialization of green investment.

Keywords: *Collaboration, Green investment socialization, economic transformation*

1. PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah di Kalimantan Timur secara resmi disahkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada dasarnya, Kalimantan Timur adalah daerah dengan potensi sumber daya alam alami yang mampu menopang aktifitas produksi daerah. Pertambangan adalah sektor unggulan di Kalimantan Timur. Sektor pertambangan Kalimantan Timur, mampu mengeksport pasokan input penghasil energi untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Namun dengan adanya penetapan IKN di Kalimantan Timur, akan memberikan dampak penambahan penduduk secara tidak alami sehingga lonjakan kebutuhan dasar pada sektor pangan dan energi perlu diwaspadai. Kebutuhan energi Kalimantan Timur masih 96% berasal dari energi fosil (Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah), sedangkan untuk kebutuhan pangan dasar (beras), membutuhkan 226.002 ton. Dari total kebutuhan pangan tersebut, Kalimantan Timur masih mengalami defisit kebutuhan pangan dasar sebesar 181.579 ton. Saat IKN Nusantara mulai dihuni hingga tahun 2024, kebutuhan beras akan meningkat menjadi 498.520 ton. Angka tersebut dihitung dengan menggunakan metode Pola Pangan Harapan (PPH). Angka tersebut masih jauh dari kapasitas pangan Kalimantan [1].

Mengisi kekurangan kebutuhan tersebut, Kalimantan Timur membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, faktor kuncinya peningkatan produksi adalah investasi. Agar sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Timur yaitu Green Economy, maka perlu didorong konsep investasi hijau (*Green Investment*). [2] menyebutkan investasi hijau sebagai modal yang diinvestasikan yang selaras dengan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi. Penelitian yang serupa dilakukan oleh [3] dengan studi perbandingan investasi hijau di Indonesia dan China pada sektor energi (batu bara). Mereka menyimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki keuntungan pada pasar tenaga kerja batubara. Batubara masih memiliki daya tarik dan diperkirakan akan terus meningkat. Namun mereka juga menemukan bahwa masih kurangnya investasi pembangkit listrik tenaga batu bara walaupun memiliki ruang potensial. Ironi ini juga sebelumnya telah dikemukakan oleh [6] dengan pendekatan menggunakan data empiris sektor swasta. Studi ini sangat menekankan pada Indonesia yang perlu bekerja lebih keras untuk mengimbangi investasi yang rendah, terutama pada investasi di sektor energi. Dimana Indonesia dikenal dengan sumber daya energi yang melimpah. Selanjutnya, pendekatan studi literatur yang dilakukan [5] menyajikan perdebatan dan konsensus pemikiran tentang ekonomi hijau. Peneliti mengutip kajian penting yang ditampilkan dalam studinya bahwa “penyertaan modal yang diinvestasikan dengan benar berasal dari kombinasi jalan buntu yang saling terkait”. Indonesia adalah negara berkembang dengan komitmen investasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim [10]. Hal ini juga tertuang dalam [7] yang menyatakan target Indonesia adalah pada penurunan emisi GRK sekitar 26% pada tahun 2019, dan memprioritaskan investasi pada sektor: kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi dan transportasi; industry; dan limbah. Dukungan pendanaan untuk mencapai ketercukupan energi dan pangan sangat dibutuhkan dalam mendukung pemindahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, terutama pada sektor penyediaan kebutuhan dasar penduduk secara berkelanjutan.

Adanya peluang tersebut, membutuhkan strategis optimalisasi potensi daerah berdasarkan keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kalimantan Timur. Namun, kekayaan sumber daya alam masih belum dimanfaatkan secara optimal. Peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pangan dan energi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan analisis kebutuhan pangan dan energi di Kalimantan Timur.

2. METODE PELAKSANAAN

Permasalahan yang uraikan sebelumnya, akan diselesaikan dengan metode sosialisasi/penyuluhan. Hal ini berujuan untuk meningkatkan kesiap-siagaan pemerintah dalam mengakomodir potensi yang ada dan/atau menambah kebutuhan pagang dan energi. Materi kunci yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah:

1. Prediksi kebutuhan penduduk berkelanjutan
2. Pentingnya investasi hijau
3. Perepan investasi hijau di Negara berkembang

Kegiatan dilakukan dengan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dengan tujuan untuk memberikan prepepsi sebagai alternatif kebijakan dalam implementasi investasi hijau pada kebutuhan dasar penduduk untuk mendukung IKN Nusantara dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Jadwal sebegai berikut.

Tabel 1. Instansi Sasaran Penyuluhan

No	Perwakilan Instansi	Indikator keberhasilan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemahan Konsep
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Investasi Hijau
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dalam mendukung Ibu Kota Negara
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nusantara
5	Dinas Perkebunan	

3. PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kebutuhan Dasar Penduduk IKN

Peningkatan urbanisasi menyebabkan beberapa tantangan lingkungan dan sosial, disamping adanya peningkatan kebutuhan yang juga bertambah. Dalam kasus peningkatan penduduk yang disebabkan oleh adanya migrasi seperti dengan adanya pemindahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, akan direspon lambat oleh ketersediaan kebutuhan dasar terutama pada sektor energi dan pangan. Diperkirakan (UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, lampiran 2) populasi IKN akan mencapai 1,7 – 1,9 juta jiwa, dimana data BPS menunjukan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 178.681 jiwa.

Konsumsi masyarakat cenderung berada pada kondisi tren yang meningkat. Hal ini mengindikasikan laju kebutuhan akan konsumsi lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Kondisi ini harus dibarengi dengan penambahan lahan dalam untuk mencukupkan kebutuhan pangan. Ironinya, penduduk juga membutuhkan lahan untuk pembangunan perumahan, fasilitas sosial, ekonomi dan kebutuhan investasi. Hal ini menjadi isu penting untuk penetapan kebijakan strategis. Pemerintah perlu memperhatikan pasokan energi dan pangan yang ada dalam suatu daerah terus terpenuhi. Namun daerah perlu memutus ketergantungan pasokan dari luar daerah, dengan adanya investasi pada sektor sumber daya alam, terutama sektor enegi dan pangan.

Studi tentang kebutuhan energi dan pangan di IKN Nusantara misalnya yang dilakukan oleh [1] mengitung kebutuhan pangan penduduk IKN Nusantara dengan menggunakan metode Pola Pangan Harapan (PPH). Hasil analisis menunjukkan bahwa pasokan pangan makanan pokok yang harus disediakan di tingkat pasar di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 untuk komoditas beras 498.520-ton dan jagung sebanyak 1.727 ton. Kebutuhan ini juga diikuti dengan tambahan penyediaan kebutuhan pelengkap makanan pokok seperti komoditas umbi-umbian, pangan hewani dan non hewani, buah, dan kebutuhan rempah. Penyediaan kebutuhan tersebut, dalam jangka waktu pendek dapat diatasi dengan memasok pangan dari wilayah luar Kalimantan Timur, namun dalam jangka Panjang kebutuhan pangan dengan ditingkat pasar tersebut dapat dipenuhi jika peningkatan produksi setempat, dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan dan sumberdaya pendukung lainnya. Mendukung penciptaan hal tersebut, diperlukan sejumlah dana (investasi) tanpa merusak sumber daya alam yang telah ada.

2. Pentingnya Investasi Hijau

Investasi diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak pada suatu proyek atau kegiatan pembangunan, dengan mengharapkan balas jasa berupa keuntungan dari kegiatan pendanaan tersebut. Adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan, memiliki kecenderungan tidak memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Penanaman modal pada sektor-sektor lingkungan juga diperlukan untuk menyeimbangi kegiatan pembangunan secara ekonomi dan sosial. Investasi pada sektor energi dan pangan ataupun pada sektor kekayaan sumber daya alam (lingkungan) disebut dengan investasi hijau. Definisi investasi hijau terus berkembang, [9] Investasi hijau merupakan penanaman modal yang meluas ke area yang meliputi pengolahan dan daur ulang limbah, sanitasi air, pengendalian polusi industri, perlindungan keanekaragaman hayati dan yang tak kalah pentingnya, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi. [2] menyebutkan investasi hijau sebagai modal yang diinvestasikan dalam arah ekologi. Badan Kordinasi Penanaman modal [8] menyatakan Green Investment adalah kegiatan penanaman modal yang dikelola perusahaan atau prospek investasi dan pemerintah, yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.

Studi tentang investasi hijau diberbagai negara memberikan prespektif pentingnya investasi hijau dalam mendorong kebutuhan penduduk secara berkelanjutan. Studi oleh [2] tentang dampak investasi energi di Indonesia misalnya. Mereka menggunakan variabel pada sektor ketenagalistrikan. Hasil studinya mengungkapkan bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi dan angin membutuhkan investasi yang paling signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto. Selanjutnya studi Kang et al., (2021) dengan perbandingan investasi hijau di Indonesia dan China pada sektor energi (batu bara) menyimpulkan bahwa Indonesia masih mendominasi penyerapan tenaga kerja pada tambang batubara yang diperkirakan akan terus meningkat. Disisi lain, masih kurangnya investasi pembangkit listrik tenaga batu bara walupun memiliki ruang potensial. Hal ini dilengkapi oleh studi [6] dengan pendekatan menggunakan data empiris sektor swasta yang menekankan rekomendasi bahwa Indonesia yang perlu bekerja lebih keras untuk mengimbangi investasi yang rendah, terutama pada investasi di sektor energi. Dimana Indonesia dikenal dengan sumber daya energi yang melimpah.

Studi [5] dengan tujuan mengevaluasi investasi hijau di China pada periode 2010-2018. Pada proses evaluasi, mereka melakukan spesifikasi pada perusahaan yang terdaftar dan relevan dengan proyek tersebut, serta spesifikasi faktor penentu investasi hijau. Model yang dikembangkan menunjukan bahwa sektor energi Tiongkok secara keseluruhan menerima tingkat investasi hijau yang berlebihan jika dibandingkan dengan ekspetasi tingkat investasi optimal. Studi pada wilayah yang sama dilakukan oleh Shen et al., (2021) dengan kelebihan penelitian

menggunakan data panel periode 1995-2017. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah menguji apakah biaya sumber daya alam, investasi hijau, pembangunan keuangan dan konsumsi energi dalam mitigasi emisi karbon akan tujuan pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan adanya penguatan undang-undang pajak alam nasional, promosi investasi hijau dan kebijakan ramah lingkungan untuk mengendalikan emisi karbon. Membandingkan studi sebelumnya di China dan Indonesia, terutama wilayah Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik jumlah penduduk yang tinggi, memberikan rekomendasi bahwa investasi hijau sangat diperlukan untuk diadopsi untuk pengembangan wilayah.

Dampak kurangnya investasi hijau di Indosensia, contohnya yang dinyatakan oleh [6], dimana Indonesia berubah drastis dari net oil eksportir menjadi net oil importer pada tahun 2004. Selanjutnya, studi [6] dalam studinya menyatakn bahwa “penyertaan modal yang diinvestasikan dengan benar berasal dari kombinasi jalan buntu yang saling terkait”. Indonesia adalah negara berkembang dengan komitmen investasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim [10]. Hal ini juga tertuang dalam [7] yang menyatakan target Indonesia adalah pada penurunan emisi GRK sekitar 26% pada tahun 2019, dan memprioritaskan investasi pada sektor: kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi dan transportasi; industry; dan limbah. Kondisi ini menyatakan bahwa pengembangan wilayah memerlukan kolaborasi antar sektor dan subsektor. Dukungan pendanaan untuk mencapai ketercukupan energi dan pangan sangat dibutuhkan dalam mendukung pemindahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, terutama pada sektor penyediaan kebutuhan penduduk secara berkelanjutan.

3. Penerapan Investasi Hijau di Negara Berkembang

Implementasi ketersediaan kebutuhan dasar oleh pemerintah tentu saja diperhadapkan dengan kendala dalam memastikan daerah mampu memenuhi kebutuhan tersebut. [10] dalam studinya menyebutkan bahwa terjadi perkembangan investasi di Indonesia, namun masih dibarengi dengan berbagai keterbatasan iklim investasi. Beberapa kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut dikemukakan oleh peneliti sebelumnya pada kasus diberbagai Negara, antara lain [9], [2], [3], dan [4] :

1. Pemerintah/pengambil kebijakan perlu mengenali faktor-faktor untuk memfasilitasi kemajuan proyek investasi hijau;
2. Adanya konsistensi arah kebijakan investasi hijau dan pembangunan daerah;
3. Pemahaman keterkaitan antar daerah dan masalah spasial wilayah;
4. Menekankan investasi pada proyek ramah lingkungan;
5. Mempertimbangkan kondisi geografis wilayah;
6. Meningkatkan sistem pengawasan investasi;
7. Mengembangkan pasar yang dioptimalkan untuk pertimbangan volatilitas pasar;

Berdasarkan studi-studi tersebut, selanjutnya sinkronisasi dilakukan dengan program pada masing-masing OPD. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2022 (jadwal hari disesuaikan dengan jadwal kesepakatan dari masing-masing OPD), pada dasarnya Kalimantan Timur telah menerapkan pembangunan dan mengarahkan investasi berkelanjutan yang merupakan komplementer dari istilah investasi hijau. Misalkan pada sektor pangan, Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengembangan kawasan food estate untuk menambah kapasitas pangan daerah; pemanfaatan lokasi bekas tambang menjadi wilayah perternakan; kolaborasi perkebunan dan perternakan untuk pemanfaatan lahan sawit dan ternak sapi; serta pada sektor perikanan telah menetapkan program “perikanan biru” untuk mengurasi degradasi perairan. Begitu pula pada subsektor energi, Kalimantan Timur telah mengoptimalkan pembangunan PLTS dan memanfaatkan biogras pada wilayah perumahan masyarakat yang

minim sarana prasarana. Rekomendasi peningkatan investasi hijau adalah dengan menitikberatkan aliran dana yang masuk pada program-program ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dokumentasi kegiatan, secara visual sebagai berikut.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Penambahan kebutuhan dasar akan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dampak ditetapkannya wilayah tersebut menjadi Ibu Kota Negara. Penduduk di wilayah PPU dan sekitarnya akan bertambah sebesar 800-950% dari kondisi jumlah penduduk di tahun 2020. Menutupi kebutuhan dasar dengan penyediaan yang ada, Kalimantan Timur perlu aliran dana untuk mempercepat ketersediaan kebutuhan dasar tersebut. Pada dasarnya Kalimantan Timur telah menerapkan program kegiatan pembangunan pada arah yang merupakan komplementer dari istilah investasi hijau. Penyuluhan peran investasi hijau memberikan persepsi pentingnya pemerintah daerah mengalokasikan dana masuk pada kegiatan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Investasi hijau adalah kegiatan yang memberikan dampak jangka panjang, sehingga sangat diperlukan perencanaan, kolaborasi antar sektor dan subsektor, serta kewenangan daerah untuk mengawasi kegiatan di wilayah Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Deshaliman dan Gantina, A. (2019). Perencanaan Penyediaan Pangan Penduduk Ibukota Negara Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Telaahan Berbasis Pola Pangan Harapan. *Jurnal Pilar Ketahanan Pangan*, 01(01), 25–38.
- [2] Hartono, D., Hastuti, S. H., Halimatussadiah, A., Saraswati, A., Mita, A. F., & Indriani, V. (2020). Comparing the impacts of fossil and renewable energy investments in Indonesia: A

-
- simple general equilibrium analysis. *Heliyon*, 6(6), e04120. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04120>
- [3] Kang, X., Zhang, J., Zhang, H., Li, S., Zhang, Y., Zhang, K., & Li, D. (2021). Research on economic risk early-warning of China's overseas investment of coal-fired power generation: Take Indonesia as an example. *Structural Change and Economic Dynamics*, 56, 298–309. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.12.003>
- [4] Liu, L., Zhao, Z., Zhang, M., & Zhou, D. (2022). Green investment efficiency in the Chinese energy sector: Overinvestment or underinvestment? *Energy Policy*, 160, 112694. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112694>
- [5] Magalhães, N. (2021). The green investment paradigm: Another headlong rush. *Ecological Economics*, 190, 107209. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107209>
- [6] Maulidia, M., Dargusch, P., Ashworth, P., & Ardiansyah, F. (2019). Rethinking renewable energy targets and electricity sector reform in Indonesia: A private sector perspective. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 101, 231–247. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.11.005>
- [7] Rachman, H. H. (n.d.). *ARAH DAN KEBIJAKAN GREEN INVESTMENT*. 40.
- [8] Sarabi, S., Han, Q., Romme, A. G. L., de Vries, B., Valkenburg, R., & den Ouden, E. (2020). Uptake and implementation of Nature-Based Solutions: An analysis of barriers using Interpretive Structural Modeling. *Journal of Environmental Management*, 270, 110749. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110749>
- [9] Shen, Y., Su, Z.-W., Malik, M. Y., Umar, M., Khan, Z., & Khan, M. (2021). Does green investment, financial development and natural resources rent limit carbon emissions? A provincial panel analysis of China. *Science of The Total Environment*, 755, 142538. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142538>
- [10] Suroso, D. S. A., Setiawan, B., Pradono, P., Iskandar, Z. S., & Hastari, M. A. (2022). Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector. *Environmental Science & Policy*, 131, 188–195. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.022>
- [11] Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- [12] Zaini, A. (2018). Analisis Kebutuhan dan Kemampuan Penyediaan Pangan di Kalimantan Timur. *Prosiding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) 2018 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 747–757.
-